

# **Analisis penerapan program berbasis cooperative compliance untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (studi pada KPP minyak dan gas bumi) = Analysis of cooperative compliance program to improve taxpayer compliance (studies on oil and gas tax office)**

Muhammad Fadli Alfian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20491144&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

### **<b>ABSTRAK</b>**

Pendekatan kepatuhan berbasis cooperative compliance merupakan paradigma baru kepatuhan pajak di Indonesia yang coba diterapkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan program berbasis cooperative compliance pada KPP Minyak dan Gas Bumi beserta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan program tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yakni penerapan cooperative compliance di KPP Minyak dan Gas Bumi dilakukan melalui kegiatan focus group discussion dan diskusi mendalam yang dilakukan sesuai karakteristik cooperative compliance oleh OECD. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi internal dan lambatnya respon fiskus terhadap pemecahan masalah Wajib Pajak peserta cooperative compliance.

<hr>

### **<i><b>ABSTRACT</b></i>**

Cooperative compliance is a new tax compliance paradigm in Indonesia which tried to be implemented by KPP Minyak dan Gas Bumi. This research aim to identify the implementation cooperative compliance program on KPP Minyak dan Gas Bumi. This research is done by doing a study of the literature and field studies in the form of an interview. the research approach used is a qualitative research approach. The results of this study indicate that the implementation of cooperative compliance in KPP Minyak dan Gas Bumi to taxpayer was implemented through focus group discussions and intensive discussions which conducted according to the characteristics of cooperative compliance by OECD. Then the problem and challenges are lack of internal coordination in KPP Minyak dan Gas Bumi regarding this program and lack of fast response regarding to the settlement of taxpayer participant compliance issues.<i/>